RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

Strategi Komunikasi Krisis Badan Komunikasi Kepresidenan dalam Kontroversi MBG: Analisis SCCT

Muhammad Nashshar Al Fayyadh[1], Istiqamah Hilma Zahara[2], Syahila Amalia Salsabila[3], Ikhsan Ahmad[4]

[1]Ilmu Komunikasi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 6662250230@student.untirta.ac.id
[2]Ilmu Komunikasi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 6662250241@student.untirta.ac.id
[3]Ilmu Komunikasi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 6662250227@student.untirta.ac.id
[4]Ilmu Komunikasi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: ikhsan@untirta.ac.id

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menuai kontroversi akibat dugaan keracunan makanan dan penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI terhadap kontroversi tersebut dengan menggunakan kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, mengumpulkan data berupa pernyataan, klarifikasi, dan publikasi resmi Bakom RI serta pemberitaan media pada periode 17 Juni sampai 10 Oktober 2026. Teknik analisis data dilakukan dengan memetakan respons Bakom ke dalam klaster krisis SCCT dan empat kategori strategi respons, yaitu deny, diminish, rebuild, dan bolster, kemudian menilai kesesuaiannya dengan tingkat atribusi tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakom RI cenderung menggunakan strategi bolster dan diminish melalui penegasan mandat politik, penonjolan manfaat program, pengakuan tantangan, dan dialog dengan pemangku kepentingan. Strategi tersebut lebih berorientasi pada upaya mempertahankan legitimasi kebijakan dibandingkan menjawab secara langsung persoalan teknis yang menjadi pangkal kritik publik. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan strategi komunikasi krisis pemerintah dalam kontroversi kebijakan publik di Indonesia.

Kata Kunci:

Bakom RI; Makan Bergizi Gratis; Komunikasi Krisis; SCCT; Kontroversi Kebijakan

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the priority policies of President Prabowo Subianto's administration that has sparked controversy due to allegations of food poisoning and budget misuse. This study aims to analyze the response of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia to the controversy using the framework of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). The approach used is qualitative with a case study design, collecting data in the form of statements, clarifications, and official publications of Bakom RI as well as media coverage during the period of June 17 to October 10, 2026. Data analysis was conducted by mapping Bakom's responses into SCCT crisis clusters and four response strategy categories: deny, diminish, rebuild, and bolster, then assessing their suitability with responsibility attribution. The results show that Bakom RI tends to use bolster and diminish strategies through affirming political mandates, highlighting program benefits, acknowledging challenges, and engaging in dialogue with stakeholders. These strategies are more oriented toward maintaining policy legitimacy than directly addressing the technical issues that are the source of public criticism. This study contributes to mapping government crisis communication strategies in public policy controversies in Indonesia.

Keywords:

Bakom RI; Free Nutritious Meal Program; Crisis Communication; SCCT; Policy Controversy

PENDAHULUAN

Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang dihasilkan dari keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam upayanya untuk meraih Indonesia Emas 2045. Program ini merupakan salah satu program yang didorong oleh presiden yang melihat permasalahan kekurangan gizi terhadap anak-anak sehingga diharapkan bisa membantu dan mendorong para penerus generasi agar memiliki gizi yang baik. Program ini juga diharapkan bisa membantu mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial dalam hal akses terhadap makanan yang bergizi.

Kontroversi yang terjadi dari program ini adalah bahwasanya dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan yang patut ditinjau dan dievaluasi, seperti adanya dugaan keracunan makanan akibat pengelolaan yang kurang memadai hingga adanya dugaan penyalahgunaan dana atau anggaran. Permasalahan-permasalahan tersebut memicu tuntutan dari sebagian kelompok masyarakat agar program dihentikan, sementara di sisi lain pemerintah tetap mempertahankan keberlanjutan program dengan alasan mandat politik dan manfaat sosial. Tegangan antara tuntutan penghentian dan keberlanjutan program inilah yang menjadi pangkal kontroversi yang menuntut respons komunikasi dari lembaga resmi pemerintah.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respons dan sikap pemerintah, khususnya Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, dalam menangani kontroversi tersebut. Sampai saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji respons komunikasi Bakom RI terhadap kontroversi MBG, terutama yang berkaitan dengan dugaan keracunan makanan dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Padahal, respons komunikasi pemerintah dalam situasi krisis kebijakan menjadi indikator penting mengenai akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah dalam mengelola program prioritas nasional.

Beberapa penelitian yang memiliki pembahasan mengenai komunikasi pemerintah dalam program MBG memiliki sudut pandang yang berbeda. Artikel yang berjudul "Strategi Public Relations Politik Pemerintahan Prabowo dalam Program Makan Bergizi Gratis" menemukan bahwa komunikasi pemerintah cenderung satu arah dan terpusat melalui PCO, dengan penggunaan media sosial untuk membangun citra positif serta pengelolaan krisis dalam menghadapi kritik. Penelitian tersebut juga menyoroti persoalan transparansi anggaran dan keterlibatan pemangku kepentingan. Namun, penelitian itu membahas strategi public relations secara luas, sehingga penelitian yang dilakukan sekarang dapat lebih memusatkan perhatian pada respons Bakom RI terhadap kontroversi spesifik, khususnya dugaan keracunan makanan dan dugaan penyalahgunaan anggaran (Dzakiyah et al., 2025).

Penelitian milik Yuniarti dan Andriza (2026) berfokus pada sentimen dan opini publik terhadap unggahan di Instagram dan tidak dalam bentuk respons atau sikap komunikasi Bakom RI itu sendiri. Hasilnya menunjukkan sentimen publik didominasi sentimen netral sebesar 48%, diikuti sentimen positif sebesar 36% dan negatif sebesar 16%. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa komunikasi Bakom RI belum cukup responsif, terutama dalam menanggapi komentar negatif. Berbeda dari penelitian tersebut yang berfokus pada konten Instagram dan sentimen masyarakat, penelitian ini mengkaji respons komunikasi pemerintah terhadap kontroversi MBG dengan menitikberatkan pada bentuk pernyataan, klarifikasi, dan penjelasan resmi Bakom RI dalam menghadapi persoalan yang muncul.

Sementara itu, penelitian Pujiyanto dan Solihat (2026) yang berjudul "Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus SMKN 1 Jogonalan" membahas pelaksanaan komunikasi pemerintah di tingkat sekolah melalui wawancara dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guru, dan peserta didik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sosialisasi resmi kepada peserta didik dan orang tua belum berjalan optimal, sementara informasi dari media sosial yang validitasnya belum terjamin menimbulkan kekhawatiran terhadap program MBG. Penelitian tersebut menekankan pentingnya komunikasi yang transparan, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada komunikasi implementasi program di tingkat lokal, sedangkan penelitian ini berfokus pada komunikasi Bakom RI di tingkat pusat dalam merespons kontroversi dan menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian publik.

Penelitian terdahulu mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membahas strategi public relations politik pemerintahan Prabowo, efektivitas komunikasi pemerintah melalui media sosial, sentimen opini publik, serta pelaksanaan komunikasi program di tingkat sekolah. Namun, kajian-kajian tersebut masih memiliki fokus yang berbeda. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI merespons kontroversi MBG, terutama dugaan keracunan makanan dan dugaan penyalahgunaan anggaran, melalui pernyataan resmi, klarifikasi, serta strategi komunikasi krisis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada respons komunikasi Bakom RI dalam menangani kontroversi tersebut, termasuk bagaimana pemerintah menjelaskan permasalahan, menyampaikan pertanggungjawaban, dan membangun kepercayaan publik di tengah kritik terhadap pelaksanaan program MBG.

Syahila Respons Bakom RI yang telah dipaparkan perlu dibaca dengan kerangka yang dapat menilai apakah respons tersebut sepadan dengan krisis yang dihadapi. Kerangka yang dipakai dalam tulisan ini adalah *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), teori komunikasi krisis berbasis kognitif yang dikembangkan Coombs dan bertumpu pada teori atribusi. Ketika krisis terjadi, publik mencari penyebabnya lalu menilai seberapa pantas organisasi dimintai tanggung jawab. Tingkat atribusi itu menentukan besarnya ancaman reputasi, dan ancaman tersebut menjadi dasar memilih respons (Coombs, 2022).

Langkah pertama dalam SCCT adalah menggolongkan krisis ke dalam tiga klaster, yaitu korban (*victim*), kecelakaan (*accidental*), dan dapat dicegah (*preventable*). Atribusi tanggung jawab paling lemah pada klaster korban dan paling kuat pada klaster dapat dicegah. Riwayat krisis dan reputasi awal organisasi dapat memperberat ancaman (Coombs, 2022). Kemarahan moral sebagai faktor ketiga dalam menilai ancaman, di samping penilaian bahwa situasi itu negatif dan penilaian tanggung jawab. Mempertimbangkan emosi publik seperti kemarahan moral ketika merespons krisis juga sangat diperlukan.

Langkah kedua adalah memilih strategi respons. Strategi dikelompokkan menjadi *deny* (denial, attack the accuser, scapegoat), *diminish* (excuse, justification), *rebuild* (apology, compensation), dan *bolster* (reminder, ingratiation, victimage) (Ayyu et al., 2026). Makin kuat atribusi tanggung jawab, makin akomodatif respons yang semestinya dipilih (Coombs, 2022). Kerangka ini sudah dipakai untuk membaca respons pemerintah, misalnya pada respons pemerintah terhadap demonstrasi tunjangan DPR (Ayyu et al., 2026).

Kerangka berpikir tulisan ini mengikuti urutan tersebut. Kontroversi MBG diklasifikasikan lebih dulu ke dalam klaster krisis beserta faktor pemberatnya. Respons Bakom RI kemudian dipetakan ke strategi SCCT, dan kesesuaian antara jenis krisis dan strategi yang dipilih menjadi bahan penilaian. Berdasarkan kerangka itu, penelitian ini bertujuan menganalisis klasifikasi krisis dan strategi respons Bakom RI dalam kontroversi MBG menggunakan SCCT.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai strategi komunikasi krisis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian berupa praktik komunikasi yang bermakna, kontekstual, dan memerlukan interpretasi terhadap pesan yang disampaikan oleh aktor komunikasi pemerintah. Desain studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri secara rinci rentetan pernyataan, klarifikasi, dan publikasi resmi Bakom RI dalam kurun waktu tertentu.

Fokus penelitian ini adalah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI sebagai aktor komunikasi pemerintah dalam strategi komunikasi krisis menghadapi kontroversi MBG. Bakom RI dipilih sebagai unit analisis karena lembaga ini merupakan instansi resmi yang bertugas menyampaikan kebijakan dan posisi pemerintah kepada publik, sehingga setiap pernyataan yang dikeluarkan dapat dianggap sebagai representasi posisi resmi pemerintah.

Data yang digunakan berupa pernyataan dan klarifikasi Bakom RI yang dimuat dalam berita media maupun postingan resmi yang dikeluarkan oleh Bakom RI atau pemberitaan yang terkait, dengan rentang waktu 17 Juni sampai 10 Oktober 2026. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada munculnya pernyataan publik pertama yang menegaskan keberlanjutan program hingga dialog strategis Bakom RI dengan Kadin Indonesia. Sumber data meliputi berita media daring, akun media sosial resmi Bakom RI, serta laporan media yang mereproduksi pernyataan resmi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumentasi melalui berita di internet dan media sosial yang berupa pernyataan, klarifikasi, dan publikasi resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan pemberitaan media yang berhubungan dengan isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 17 Juni sampai 10 Oktober 2026. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) untuk memahami jenis krisis dan strategi komunikasi pemerintah. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana Bakom RI merespons kontroversi program MBG melalui komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Data dibaca dengan kerangka SCCT. Langkah pertama adalah menentukan klaster krisis (korban, kecelakaan, atau dapat dicegah) dengan melihat seberapa besar tanggung jawab yang dilekatkan publik dan media kepada pemerintah. Riwayat krisis, reputasi awal, dan kemarahan moral publik kemudian dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat memperberat ancaman reputasi. Setelah itu, respons Bakom dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu klarifikasi, koreksi informasi, penjelasan kebijakan, dan respons terhadap kritik. Bentuk pesan dari tiap respons dicatat, lalu dicocokkan dengan strategi SCCT (deny, diminish, rebuild, atau bolster) dan diperiksa apakah strategi itu sepadan dengan klaster krisisnya.

Hasil pencocokan disusun dalam tabel dengan kolom respons Bakom, bentuk pesan, kategori SCCT, dan kesesuaian, kemudian dijelaskan secara naratif. Untuk menjaga keabsahan data, unggahan resmi Bakom dibandingkan dengan pemberitaan dari beberapa media. Pengodean strategi juga dicek bergantian antar anggota tim supaya tidak bergantung pada satu penafsiran. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan resmi Bakom dengan pemberitaan media independen dan reaksi publik di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam melaksanakan program ini, pemerintah menghadapi kritik dan isu negatif yang memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan, manfaat, dan keberlanjutannya. Dari beberapa sumber yang diperoleh, respons pemerintah tidak hanya berfokus pada penjelasan manfaat program,

tetapi juga pada penegasan bahwa MBG merupakan bagian dari mandat politik Presiden serta upaya menerima masukan untuk memperbaiki pelaksanaannya.

Pada pernyataan yang disampaikan Kepala Bakom RI Muhammad Qodari pada 17 Juni 2026, Qodari menegaskan bahwa MBG tidak semestinya dihentikan hanya karena menghadapi tantangan. Ia mengaitkan keberlanjutan program dengan janji kampanye Presiden Prabowo, tujuan mengatasi persoalan gizi anak, serta komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan menerima masukan masyarakat. Kasus ini dapat dipahami sebagai respons komunikasi pemerintah terhadap kritik dan tuntutan penghentian program MBG. Fokus penelitian bukan membuktikan bahwa seluruh kritik terhadap MBG benar atau salah, melainkan mengidentifikasi bagaimana pemerintah membingkai persoalan, menyampaikan pembelaan terhadap program, dan merespons kritik yang muncul.

Perlu dibatasi bahwa sumber yang diberikan belum cukup untuk menetapkan satu insiden spesifik sebagai pemicu awal kontroversi. Karena itu, gambaran kasus sementara lebih tepat berfokus pada kontroversi mengenai keberlanjutan dan persepsi negatif terhadap MBG, bukan sekadar mengklaim bahwa kontroversi tersebut hanya bermula dari satu kejadian tertentu. Berikut adalah kronologi respons komunikasi yang terdokumentasi, bukan kronologi lengkap seluruh kontroversi MBG.

Tabel 1. Kronologi Respons Bakom RI terhadap Kontroversi MBG (17 Juni - 10 Oktober 2026)

Tanggal	Aktor	Bentuk Komunikasi	Substansi Pesan
17 Juni 2026	Kepala Bakom RI Muhammad Qodari	Pernyataan kepada media (Tribrata News)	Menegaskan MBG tidak dihentikan karena merupakan bagian dari visi dan janji politik Presiden Prabowo.
17 Juni 2026	Kepala Bakom RI Muhammad Qodari	Video di Facebook Kompas.com	Penegasan keberlanjutan MBG dan pengakuan adanya tantangan dalam pelaksanaan.
23 Juli 2026	Bakom RI (Instagram @Bakom.RI)	Postingan resmi	Reformasi 7 minggu BGN di bawah Naniek S. Deyang telah memperbaiki tata kelola program MBG.
10 Oktober 2026	Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan	Dialog dengan Kadin Indonesia (Anindya Bakrie)	Menampung keluhan dunia usaha, termasuk isu terkait program MBG.

Pada tanggal 17 Juni 2026, Berita Tribrata News melaporkan bahwa Kepala Bakom RI menegaskan MBG akan tetap dijalankan karena merupakan bagian dari visi dan janji politik Presiden Prabowo. Ia menyebut tujuan penanganan persoalan gizi anak, mengakui adanya tantangan, serta menyatakan pemerintah terbuka terhadap diskusi dan masukan masyarakat. Pada tanggal yang sama, tautan Facebook Kompas.com teridentifikasi menampilkan video mengenai penegasan Qodari terkait program MBG. Jika video tersebut merekam pernyataan yang sama, ia dapat digunakan sebagai dokumentasi audiovisual untuk memeriksa pesan, pilihan kata, dan cara penyampaiannya.

Pada tanggal 23 Juli 2026, Bakom RI merilis postingan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Naniek S. Deyang telah menjalankan Reformasi 7 Minggu mulai dari 2 Juni sampai 21 Juli 2026 yang telah memperbaiki tata kelola program MBG. Pada tanggal 10 Oktober 2026, Bakom RI melakukan dialog dengan Kadin Indonesia terkait beberapa hal dan salah satunya merupakan MBG. Pemberitaan yang mereproduksi informasi BeritaSatu menyebut Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan bertemu Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie untuk mendengarkan keluhan dunia usaha, termasuk kebutuhan akan kepastian ekonomi. Pembahasan juga menyinggung MBG dan

penilaian positif Anindya berdasarkan pengalamannya di lapangan. Masukan dunia usaha disebut akan diteruskan kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Temuan Respons Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI terhadap Kontroversi Makan Bergizi Gratis (MBG)

1. Temuan Respons Bakom RI

Temuan respons Bakom RI sejak 17 Juni 2026 ditemukan pernyataan Kepala Bakom RI Muhammad Qodari yang menegaskan "Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bakom RI berupaya mempertahankan keberlanjutan program dengan menekankan tujuan utama dan dasar politik pelaksanaannya. Ia menyebut tujuan penanganan persoalan gizi anak, mengakui adanya tantangan, serta menyatakan pemerintah terbuka terhadap diskusi dan masukan masyarakat. Di tanggal yang sama, pada video Kompas.com di platform Facebook, terdapat pengakuan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi persoalan yang perlu diperhatikan.

Pada akun Instagram @Bakom.RI pada tanggal 23 Juli 2026 ditemukan pemberitaan mengenai pelaksanaan reformasi 7 minggu oleh BGN di bawah kepemimpinan Naniek S. Deyang. Postingan menyebutkan bahwa reformasi yang berlangsung sejak 21 Juli 2026 telah memperbaiki tata kelola program MBG. Informasi ini menunjukkan adanya penekanan pada upaya perbaikan sebagai bagian dari komunikasi pemerintah. Berdasarkan dokumentasi, pernyataan tersebut belum cukup untuk menilai sejauh mana perbaikan telah dilakukan atau seberapa efektif hasilnya dalam menyelesaikan persoalan yang sedang menjadi sorotan masyarakat.



Gambar 1. Tangkapan layar akun Instagram Bakom RI terkait reformasi tata kelola MBG

Pada pemberitaan tanggal 10 Oktober 2026, dalam diskusi strategis Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie membahas berbagai persoalan dunia usaha, termasuk program MBG. Masukan dari dunia usaha disebut akan diteruskan kepada kementerian, lembaga, dan pihak terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi Bakom RI juga dilakukan melalui interaksi dengan pihak terkait. Meskipun begitu, dokumentasi ini belum membuktikan bahwa semua keluhan sudah ditindaklanjuti atau komunikasi tersebut sudah menyelesaikan kontroversi MBG.

Ketiga temuan ini menunjukkan tiga kecenderungan respons komunikasi Bakom RI, yaitu mempertahankan keberlanjutan program, menonjolkan upaya perbaikan tata kelola, dan menunjukkan keterbukaan terhadap masukan pihak yang berkaitan. Kecenderungan tersebut menjadi dasar untuk memetakan strategi komunikasi Bakom ke dalam kerangka SCCT.

2. Analisis Respons Bakom RI Berdasarkan Situational Crisis Communication Theory (SCCT)

Analisis respons Bakom RI berdasarkan SCCT dilakukan dengan terlebih dahulu menempatkan kontroversi MBG ke dalam klaster krisis. Kontroversi ini berkaitan dengan dugaan keracunan makanan dan dugaan penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui pengelolaan yang baik, sehingga kontroversi MBG lebih tepat dikategorikan ke dalam klaster *preventable*. Pada klaster ini, atribusi tanggung jawab publik kepada pemerintah cenderung kuat, sehingga respons yang semestinya dipilih adalah respons yang lebih akomodatif, seperti *rebuild* dan *bolster* yang diiringi pengakuan kesalahan dan kompensasi yang konkret.

Penegasan komitmen terhadap keberlanjutan MBG

Qodari menekankan bahwa MBG merupakan bagian dari visi dan janji politik Presiden Prabowo. Pesan ini membingkai program sebagai bentuk dari komitmen politik yang harus dilaksanakan, meskipun menghadapi tantangan. Temuan awal: pemerintah menggunakan penegasan mandat politik untuk menjawab tuntutan agar program dihentikan. Dalam SCCT, strategi ini lebih dekat ke kategori *bolster* (sub-strategi *reminder*) karena mengingatkan publik pada komitmen awal pemerintah dan tujuan program.

Penekanan pada tujuan dan manfaat program

Qodari menjelaskan bahwa MBG bertujuan membantu mengatasi persoalan gizi pada anak-anak dan balita. Sementara itu, pemberitaan mengenai pertemuan yang dilakukan dengan Kadin menyoroti penilaian positif terhadap dampak MBG berdasarkan pengalaman di lapangan. Temuan awal: pesan komunikasi tidak hanya mempertahankan keberlanjutan program, tetapi juga menonjolkan tujuan sosial dan manfaat yang diklaim telah dirasakan. Catatan analitis: manfaat tersebut merupakan alasan yang disampaikan oleh aktor dalam berita, bukan bukti independen bahwa seluruh pelaksanaan MBG sudah berhasil. Strategi ini termasuk kategori *bolster* (sub-strategi *ingratiation*) yang berupaya membangun citra positif di tengah krisis.

Pengakuan terhadap tantangan dan komitmen perbaikan

Qodari mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan MBG. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap diskusi, menerima masukan masyarakat, dan berkomitmen memperbaiki tata kelola. Temuan awal: respons pemerintah memadukan pembelaan terhadap keberlanjutan program dengan pengakuan bahwa implementasinya masih menghadapi persoalan. Namun, sumber tersebut belum menjelaskan secara terperinci masalah apa yang diakui, tindakan korektif apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana hasil perbaikannya diukur. Strategi ini dekat dengan *diminish* (sub-strategi *excuse*) karena berupaya mengurangi persepsi tanggung jawab penuh dengan menekankan upaya perbaikan.

Penyerapan aspirasi melalui dialog dengan pemangku kepentingan

Dalam pemberitaan tentang pertemuan Bakom RI dan Kadin, komunikasi dilakukan melalui dialog dengan perwakilan dunia usaha. Bakom menyatakan akan menampung seluruh keluhan dan meneruskannya kepada pihak pemerintah yang berwenang. Temuan awal: Bakom menjalankan fungsi komunikasi sebagai penghubung antara pemangku kepentingan dan pemerintah. Akan tetapi, data

tersebut belum membuktikan bahwa dialog itu secara khusus diselenggarakan sebagai respons langsung terhadap krisis MBG; agenda pertemuan juga mencakup kepastian ekonomi secara lebih luas. Strategi ini dekat dengan *diminish* (sub-strategi *justification*) karena menjelaskan tindakan yang diambil tanpa harus meminta maaf atau memberi kompensasi.

Tabel 2. Pemetaan Respons Bakom RI Berdasarkan Strategi SCCT

Respons Bakom RI	Bentuk Pesan	Kategori SCCT	Kesesuaian dengan Klaster Krisis Preventable
Penegasan mandat politik Presiden	Menyatakan MBG sebagai janji politik yang tidak bisa dihentikan	Bolster (reminder)	Kurang sepadan; mengabaikan atribusi tanggung jawab pemerintah.
Penonjolan manfaat program	Menekankan tujuan penanganan gizi anak dan balita	Bolster (ingratiation)	Kurang sepadan; tidak menjawab persoalan teknis.
Pengakuan tantangan dan komitmen perbaikan	Mengakui kekurangan dan terbuka pada masukan masyarakat	Diminish (excuse)	Cukup sepadan; mengurangi tanggung jawab penuh.
Dialog dengan pemangku kepentingan	Menampung keluhan dunia usaha untuk diteruskan	Diminish (justification)	Cukup sepadan; menunjukkan upaya penyelesaian.
Klarifikasi reformasi 7 minggu BGN	Menyampaikan perbaikan tata kelola oleh BGN	Rebuild (compensation)	Sepadan; menunjukkan tindakan korektif, namun belum disertai indikator terukur.

Pemetaan pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa Bakom RI lebih banyak menggunakan strategi *bolster* dan *diminish* dibandingkan strategi *rebuild* yang lebih akomodatif. Padahal, pada klaster krisis *preventable*, respons yang dianjurkan oleh SCCT adalah *rebuild* (apology dan compensation) yang disertai pengakuan tanggung jawab. Komposisi respons Bakom RI menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan legitimasi kebijakan alih-alih merespons langsung persoalan teknis yang menjadi pangkal kritik publik.

Selain pemetaan pada Tabel 2, temuan dapat dirangkum berdasarkan empat jenis respons Bakom RI yang telah diidentifikasi, yaitu klarifikasi, koreksi informasi, penjelasan kebijakan, dan respons terhadap kritik. Tabel 3 menyajikan bentuk pesan, kategori SCCT, serta tingkat kesesuaian tiap jenis respons tersebut dengan klaster krisis preventable.

Tabel 3. Analisis Strategi Respons Bakom RI Berdasarkan SCCT

Respons Bakom	Bentuk Pesan	Kategori SCCT	Kesesuaian
Klarifikasi	Pernyataan Kepala Bakom RI Muhammad Qodari pada 17 Juni 2026 bahwa MBG tidak dapat dihentikan karena merupakan janji politik Presiden Prabowo, disertai pengakuan adanya tantangan dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat.	Diminish (justification) + Bolster (ingratiation)	Cukup kurang strategi defensif tidak sepadan dengan klaster preventable (keracunan makanan dan penyalahgunaan dana) yang menuntut rebuild berupa permintaan maaf dan kompensasi konkret.
Koreksi informasi	Postingan Instagram Bakom RI pada 23 Juli 2026 mengenai Reformasi 7 Minggu yang dijalankan BGN di bawah kepemimpinan Naniek S. Deyang untuk memperbaiki tata kelola program MBG.	Rebuild (compensation, partial) + Bolster (reminder)	Sesuai untuk klaster accidental (tata kelola BGN), namun belum mencakup kompensasi konkret kepada korban dugaan keracunan makanan sehingga belum sepenuhnya memenuhi tuntutan rebuild pada klaster preventable.
Penjelasan kebijakan	Penekanan tujuan sosial MBG untuk mengatasi persoalan gizi anak dan balita, serta penilaian positif terhadap dampak program berdasarkan pengalaman lapangan yang disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia.	Bolster (ingratiation, reminder, victimage)	Tidak sesuai untuk krisis preventable (keracunan dan penyalahgunaan dana) yang menuntut rebuild; strategi bolster hanya cocok sebagai pelengkap pada klaster victim atau accidental dengan ancaman rendah.
Respons terhadap kritik	Dialog Bakom RI dengan Kadin Indonesia pada 10 Oktober 2026 yang menampung keluhan dunia usaha dan menyalurkannya kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.	Diminish (excuse) + Bolster (ingratiation)	Cukup kurang dialog dengan Kadin lebih relevan untuk isu ekonomi dan tata kelola, tetapi tidak langsung menjawab kritik teknis terkait keracunan makanan dan dugaan penyalahgunaan anggaran yang menjadi inti kontroversi.

PEMBAHASAN

Keterkaitan Respons Bakom RI dengan Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis

Respons Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) terhadap kontroversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dipahami dalam konteks munculnya tuntutan penghentian

program dari kelompok mahasiswa. Berdasarkan pemberitaan Detikcom pada 17 Juni 2026, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak dapat dihentikan hanya karena adanya tuntutan dari kelompok yang tidak menyetujui program tersebut. Qodari juga membedakan ketidaksetujuan terhadap program secara mendasar dari kritik teknis yang menurutnya masih dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan. Dengan demikian, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa respons Bakom diarahkan untuk mempertahankan keberlanjutan program sekaligus menempatkan sebagian kritik sebagai masukan bagi perbaikan implementasi.

Dalam konteks tersebut, penegasan mandat politik berfungsi sebagai dasar argumentasi pemerintah untuk mempertahankan program MBG. Bakom tidak hanya menyampaikan bahwa program tersebut merupakan janji Presiden, tetapi juga menekankan tujuan sosialnya, yaitu membantu mengatasi persoalan gizi anak-anak dan balita. Pesan ini membingkai MBG sebagai kebijakan yang memiliki tujuan substantif bagi masyarakat. Namun, dari perspektif analisis komunikasi krisis, penekanan pada mandat politik dan manfaat program perlu dibedakan dari penjelasan mengenai persoalan konkret yang menjadi dasar kritik publik. Kedua jenis pesan tersebut memiliki fungsi yang berbeda: yang pertama mempertahankan legitimasi program, sedangkan yang kedua diperlukan untuk menjawab permasalahan pelaksanaan.

Selain mempertahankan keberlanjutan program, Bakom mengakui bahwa pelaksanaan MBG menghadapi tantangan dan menyatakan keterbukaan terhadap diskusi serta masukan masyarakat. Pemerintah juga menyampaikan komitmen untuk memperbaiki tata kelola program. Respons ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan perbaikan, meskipun pemberitaan yang dianalisis belum menjelaskan secara terperinci seluruh bentuk tindakan korektif yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, komitmen perbaikan perlu diperlakukan sebagai pesan yang disampaikan pemerintah dan bukan langsung dianggap sebagai bukti bahwa persoalan implementasi telah terselesaikan.

Jika dianalisis menggunakan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), respons Bakom dapat dikaji melalui hubungan antara situasi kontroversi, atribusi tanggung jawab, dan strategi komunikasi yang digunakan. Penegasan mandat politik menunjukkan upaya mempertahankan legitimasi program, sedangkan penekanan pada manfaat sosial berfungsi memperkuat alasan keberlanjutan kebijakan. Di sisi lain, pengakuan terhadap tantangan dan keterbukaan terhadap masukan menunjukkan adanya pesan mengenai perbaikan. Kesesuaian respons tersebut dengan SCCT tetap perlu ditentukan berdasarkan karakteristik krisis dan persepsi publik terhadap tanggung jawab pemerintah. Apabila kritik berpusat pada kekurangan teknis dan tata kelola, analisis perlu menilai sejauh mana respons pemerintah menjawab persoalan tersebut, bukan hanya mempertahankan keberlanjutan program.

Berdasarkan pemetaan strategi pada Tabel 2, Bakom RI cenderung mengandalkan strategi *bolster* dan *diminish* dibandingkan *rebuild* yang lebih akomodatif. Coombs (2022) menyatakan bahwa pada klaster *preventable* dengan atribusi tanggung jawab yang kuat, strategi yang dianjurkan adalah *rebuild* (apology, compensation) yang disertai pengakuan tanggung jawab. Minimnya pernyataan permintaan maaf resmi dan kompensasi konkret atas dugaan keracunan makanan maupun penyalahgunaan anggaran menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat atribusi tanggung jawab dan strategi respons yang dipilih. Kondisi ini berpotensi memperpanjang siklus krisis karena publik menilai respons pemerintah tidak sepadan dengan besarnya masalah yang dihadapi.

Selain itu, respons Bakom RI juga perlu dipahami dalam kerangka emosi publik. Memperhitungkan kemarahan moral sebagai faktor yang memperberat ancaman reputasi Adalah hal sangat penting. Dalam kasus MBG, isu keracunan makanan yang menyangkut anak-anak berpotensi

membangkitkan kemarahan moral publik, sehingga respons pemerintah semestinya tidak hanya bersifat informatif tetapi juga empatik. Strategi komunikasi krisis yang mengabaikan emosi publik berisiko memperburuk persepsi terhadap organisasi. Pengakuan tantangan yang disampaikan Bakom RI memang menunjukkan empati, namun belum diiringi tindakan konkret yang dapat meredam kemarahan moral publik.

Kontroversi MBG memperlihatkan adanya perbedaan antara mempertahankan legitimasi kebijakan dan merespons persoalan implementasi. Temuan ini menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana Bakom RI membangun pesan komunikasi ketika menghadapi tuntutan penghentian program, sekaligus apakah komitmen perbaikan yang disampaikan telah didukung oleh tindakan dan informasi yang relevan. Analisis tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara strategi komunikasi pemerintah, tuntutan publik, dan prinsip penyesuaian respons krisis dalam SCCT. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa komunikasi pemerintah dalam program MBG cenderung satu arah dan terpusat sekaligus menambahkan dimensi baru, yaitu ketimpangan antara atribusi tanggung jawab dan strategi respons yang dipilih (Dzakiyah et al., 2025).

.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa respons Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI terhadap kontroversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung berpihak pada upaya mempertahankan legitimasi kebijakan dibandingkan menjawab secara langsung persoalan teknis yang menjadi pangkal kritik publik. Berdasarkan kerangka *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), Bakom RI lebih banyak menggunakan strategi *bolster* melalui penegasan mandat politik Presiden dan penonjolan manfaat program, serta strategi *diminish* melalui pengakuan tantangan dan keterbukaan terhadap masukan. Kontroversi MBG dapat dikategorikan ke dalam klaster *preventable* karena menyangkut dugaan keracunan makanan dan penyalahgunaan anggaran yang menuntut tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, respons Bakom RI belum sepenuhnya sepadan dengan tingkat atribusi tanggung jawab tersebut karena strategi *rebuild* berupa permintaan maaf resmi dan kompensasi yang konkret masih minim disampaikan. Komitmen perbaikan tata kelola yang dikomunikasikan juga belum diiringi penjelasan rinci mengenai tindakan korektif dan indikator keberhasilan yang terukur.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Bakom RI mengembangkan strategi komunikasi krisis yang lebih sepadan dengan tingkat atribusi tanggung jawab publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat strategi *rebuild* berupa klarifikasi rinci atas dugaan keracunan makanan dan penyalahgunaan anggaran, permintaan maaf resmi apabila kesalahan terbukti, serta komitmen kompensasi yang terukur bagi pihak yang terdampak. Selain itu, Bakom RI perlu menyertakan indikator keberhasilan yang jelas dalam setiap pernyataan komitmen perbaikan agar publik dapat memverifikasi tindakan yang dijanjikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data dengan menggali arsip pernyataan resmi Bakom RI secara lengkap, wawancara mendalam dengan juru bicara, dan analisis sentimen publik sebagai pembanding. Penelitian lanjutan juga dapat menelusuri dampak komunikasi Bakom RI terhadap perubahan persepsi publik dalam jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Ayyu, S., Azizah, L., & Purworini, D. (2026). DEMONSTRASI TUNJANGAN DPR (ANALISIS ISI

Ayyu, S. A. L., & Purworini, D. (2026). Strategi respon krisis pemerintah terhadap kasus aksi demonstrasi tunjangan DPR: Analisis isi kuantitatif pada pemberitaan media. NIVEDANA: Jurnal Komunikasi dan Bahasa, 7(2), 583–602. https://doi.org/10.53565/nivedana.v7i2.2696

Badan Komunikasi Pemerintah RI. (2026, July 22). [Unggahan Instagram tentang program Makan Bergizi Gratis]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DbHwrVFGhlU/

BeritaSatu. (2026, October 10). Bakom RI tampung keluhan Kadin soal kepastian ekonomi dan MBG. BeritaSatu. https://www.beritasatu.com/ekonomi/3032815/bakom-ri-tampung-keluhan-kadin-soal-kepastian-ekonomi-dan-mbg

Coombs, W. T. (2022). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding. SAGE Publications.

Dzakiyah, A. N., Andryandy, T., Kuswanto, F. R. H., & Syahrevi, I. (2025). Strategi public relations politik pemerintahan Prabowo dalam program Makan Bergizi Gratis. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 6885–6899. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2312

KOMPAS.com. (2026, June 17). Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak akan dihentikan, meskipun ada desakan dari sejumlah pihak [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/KOMPAScom/videos/kepala-badan-komunikasi-pemerintah-ri-muhammad-qodari-menegaskan-program-makan-b/1727037555150682/

Pujiyanto, A., & Solihat, M. (2026). Strategi komunikasi pemerintah dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi kasus SMKN 1 Jogonalan. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 7(1), 115–128. https://doi.org/10.63447/jimik.v7i1.1675

Rusdiantoro, A. (2020). Efektivitas pembelajaran Jigsaw terhadap peningkatan kemampuan literasi matematika siswa kelas XII SMA Negeri 6 Semarang. Jurnal Pendidikan Sultan Agung, 1(1), 1–9.

Tribrata News. (2026, June 17). Bakom tegaskan Presiden Prabowo jalankan MBG karena mandat dari rakyat. Tribrata News. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bakom-tegaskan-presiden-prabowo-jalankan-mbg-karena-mandat-dari-rakyat-102690

Yuniarti, T., & Andriza, B. (2026). Analisis sentimen dan opini publik: Evaluasi komunikasi media sosial Instagram Tim Kepresidenan @PCO.RI dalam menangani kontroversi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi, 11(1), 200–215. https://doi.org/10.52423/jikuho.v11i1.1982